

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya globalisasi membawa dunia menjadi sebuah tempat perbelanjaan global dimana ide - ide dan produksi tersedia dalam waktu yang bersamaan (Ikbar, 2006). Dengan kata lain globalisasi telah membawa perdagangan pada spektrum yang lebih luas. Globalisasi juga seringkali dihubungkan sebagai konsekuensi dari adanya perdagangan bebas, dimana pada abad pertengahan model perdagangan pada umumnya bersifat tertutup sehingga kegiatan ekspor dilakukan secara terbatas dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan barang lokal (Fardian, 2019). Walaupun disaat yang bersamaan juga terdapat negara yang banyak melakukan ekspor daripada melakukan pengelolaan terhadap barang lokal. Akan tetapi tipe negara konsumtif seperti ini menimbulkan penurunan terhadap kompetisi dari para pelaku bisnis karena mereka tidak dapat memaksimalkan kegiatan ekonominya.

Sejak saat itu, perdagangan bebas muncul sebagai sebuah solusi untuk memberikan keuntungan secara maksimal kepada semua pihak. Sebab dalam perdagangan bebas hambatan - hambatan perdagangan baik hambatan tarif seperti bea cukai, pajak barang mewah , pajak ekspor - impor dan lain sebagainya ataupun hambatan non - tarif seperti persyaratan dalam ekspor - impor dan kebijakan tiap negara telah dihilangkan sehingga kondisi pasar lebih terbuka dan bebas. Hal ini berimplikasi terhadap terciptanya peluang usaha yang lebih luas karena negara dalam konsep perdagangan bebas tidak diperlukan untuk mengatur mekanisme pasar (Hadiwinata, 2002). Pasar akan dengan sendirinya mengatur pembagian kerja yang saling menguntungkan dan para pelaku bisnis yang kemudian akan mempertanggungjawabkan kalkulasi keuntungan.

Namun disisi lain penerapan perdagangan bebas menuntut negara untuk bersiap dengan persaingan yang ketat. Mereka harus memastikan bahwa perdagangan bebas memberikan keuntungan bagi peningkatan perekonomiannya bukan menjadi penyebab dari menurunnya perekonomian suatu negara. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Ranti (2014) yang mana menunjukkan bahwa hadirnya sistem perdagangan internasional hanya menciptakan ketimpangan antara standar hidup masyarakat di negara industri dan negara non – industri. Negara – negara yang kemudian berada di “Utara” seperti Amerika , Eropa dan Asia Timur merasakan kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkembang secara pesat akan tetapi

untuk mereka negara – negara yang berada di “Selatan” seperti Afrika, Amerika Latin dan negara berkembang di Asia harus merasakan kenyataan pahit karena mereka dilanda kemiskinan dan kurangnya ketersediaan pangan. Padahal secara substansi, perdagangan seharusnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi semua masyarakat sehingga tercipta sebuah kondisi dimana permasalahan seperti kemiskinan dapat terhapuskan (Ranti, 2014, pp. 2-3).

Kondisi ini kemudian mendorong para pelaku usaha lokal untuk menyiapkan modal dan mental untuk bersaing secara domestik maupun internasional dengan para pelaku usaha dari seluruh penjuru dunia. Sebab tidak dapat dipungkiri setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan daya saing produknya menjadi lebih efisien dan laku di pasar internasional. Bahkan negara yang memiliki kecanggihan teknologi dan sains memungkinkan untuk memanfaatkan situasi ini dengan mengontrol alur perdagangan internasional baik secara personal maupun melalui pengendalian institusi internasional untuk mencapai keuntungan maksimal (Wahid, 2021). Artinya negara yang memiliki daya saing tinggi adalah pemenangnya. Sedangkan negara - negara yang tidak mampu bersaing akan merasakan ketidakadilan perdagangan melalui tindakan - tindakan eksploitasi oleh pemilik modal kepada produsen kecil. Sehingga mereka sulit untuk mencapai kesejahteraan dan akses ke pasar internasional.

Hal ini sama dengan apa yang dituliskan oleh Amelia Ranti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi *Fair Trade* terhadap Kemajuan Sektor Pertanian Kakao di Ghana (2003-2008)” bahwa pada awalnya ketika perdagangan bebas mulai memasuki suatu negara mereka masuk dengan cara menjelma sebagai korporasi, investor ataupun negara – negara maju dengan mengatasnamakan “bantuan” terhadap pembangunan sehingga kemudian restu dari pemerintah setempat dapat dengan mudah diraih. Namun pada praktiknya, mereka mulai memperlihatkan tujuan sebenarnya untuk mencari potensi sumber daya alam yang ada di negara tersebut dan kemudian berupaya mengamankan potensi tersebut untuk memperkaya diri. Tak jarang pula ditemukan jejak aktivitas mereka yang meninggalkan kerusakan terhadap alam (Ranti, 2014, p. 4).

Kegagalan perdagangan bebas juga dapat dirasakan pada Kawasan Afrika yang mana pada bulan januari 2022 mulai menerapkan *The African Continental Free Trade Agreement* (AfCFTA) (Thomas, 2022). Pembentukan perjanjian perdagangan bebas tersebut merupakan respon atas peningkatan regionalisme di seluruh dunia dan lahirnya skema perdagangan multilateral pada putaran Doha. Negara - negara di Afrika berharap penerapan perdagangan bebas ini dapat

mengatasi persoalan kemiskinan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebab perdagangan bebas diartikan sebagai panduan terhadap industri lokal melalui substitusi impor. Namun hal ini menjadi problematis karena pada praktiknya penerapan perdagangan bebas di Afrika akan menimbulkan ketimpangan dalam berbagai aspek mulai dari perolehan keuntungan yang tidak proporsional, rusaknya manufaktur lokal, hingga peningkatan proteksionisme dari negara - negara kecil. Hal ini dikarenakan kondisi pasar di Afrika memiliki konplementaritas rendah akan sumber daya alam, permasalahan administratif, buruknya transportasi dan biaya perdagangan yang tinggi membuat penerapan perjanjian perdagangan bebas tidak efektif dalam mempromosikan perdagangan dan investasi langsung di Afrika.

Ghana merupakan salah satu dari negara yang merasakan dampak buruk dari penerapan perdagangan bebas. Menurut PBB, Ghana merupakan negara yang tergolong sebagai negara *lower middle income* dengan pendapatan perkapita sebesar \$1,440.66 per tahun atau lebih spesifik, masyarakat Ghana hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar \$4,06 dalam sehari sehingga mereka hanya mampu mencukupi kebutuhan untuk konsumsi saja. Bahkan pendapatan dari penduduk terkaya di Ghana diibaratkan baru dapat dicapai dalam 1.000 tahun oleh penduduk miskinnya. Kemudian hal - hal seperti pemenuhan hak pendidikan, layanan kesehatan hingga hak bekerja sangat sulit untuk dicapai. Buruknya tingkat kemiskinan di Ghana membuat hampir setengah anggaran pemerintah bersumber dari bantuan negara - negara kaya (Munawaroh, 2018).

Pada hal jika dilihat dari aspek geo-politik dan geo-ekonomi, Ghana merupakan salah satu negara di Afrika Barat yang cukup potensial. Misalnya potensi pada bidang pariwisata menduduki posisi terbesar ketiga dalam meraup pendapatan asing. Kemudian pada bidang industri tradisional, Ghana memiliki hutan, perikanan dan kerajinan yang cukup menjanjikan. Belum lagi jika menilik pada bidang pertanian yang kaya akan singkong, padi, jagung dan kacang - kacangan. Berdasarkan persentase, 35% sumber ekonomi Ghana bersumber dari sektor pertanian. Sektor ini berhasil memperkejakan lebih dari 50% tenaga kerja (OXFAM International, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Aissa Boodho (2016) menunjukkan bahwa meskipun Ghana Utara merupakan negara yang potensial secara pertanian namun memang perkembangannya masih sangat kurang bahkan cenderung diabaikan. Kondisi ini berbeda dengan perkembangan di Ghana bagian selatan yang secara industrialisasi dan komersialisasinya berkembang secara signifikan (Leegsma, 2016, p. 35).

Kemudian salah satu ciri khas dari negara ini adalah *shea butter*. Produk ini dapat dikatakan sebagai mata pencaharian utama untuk jutaan perempuan di Ghana. Mereka adalah sekumpulan janda yang menggantungkan penghasilan sehari - harinya pada produksi *shea butter*. Walaupun uang yang dihasilkan dari kegiatan ini tidak setimpal dengan proses pengerjaannya karena membutuhkan waktu 5 hari untuk mencapai ekstrak yang sempurna. Akan tetapi *shea butter* sudah menjadi mata pencaharian utama yang dapat dikerjakan oleh perempuan di Ghana (KumparanSTYLE, 2019).

Pada salah satu kasus, ditemukan salah seorang janda penghasil *shea butter* yang bernama Rebecca Atorneyeg mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan US\$2 atau setara dengan Rp. 28 ribu untuk setiap pelembab yang terjual. Padahal akhir - akhir ini permintaan *shea butter* sedang meningkat namun tidak merubah fakta bahwa banyak petani janda di Ghana harus hidup dibawah garis kemiskinan. Sedangkan perusahaan - perusahaan besar yang membeli produk mereka dapat meraup keuntungan hingga 3x lebih besar. Padahal sebenarnya hadirnya perusahaan - perusahaan multinasional di Ghana Utara dapat memainkan peran penting terhadap pembangunan, perbaikan pada pendapatan domestik yang dapat digunakan untuk mendanai layanan publik yang tidak merata dan pengentasan kemiskinan di negara tersebut. Namun sangat disayangkan kehadiran perusahaan - perusahaan tersebut hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek *sustainable*. Hasilnya, negara ini kehilangan sekitar \$9,6 miliar per tahun (Pradita, 2016).

Permasalahan – permasalahan yang ditimbulkan oleh praktik perdagangan bebas membuat aktor non – negara seperti *Non – Governmental Organization* (NGOs) mengevaluasi konsep dan praktik perdagangan bebas yang dianggap merugikan produsen lokal dan keberlanjutan lingkungan. Aktor tersebut adalah OXFAM-Great Britani yang menginisiasikan konsep dan praktik praktik perdagangan model baru bernama *fair trade* yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an (Pangestu A. , 2018). *Fair Trade* sendiri merupakan sebuah konsep perdagangan yang berlandaskan prinsip keadilan dimana mereka menawarkan solusi terhadap permasalahan – permasalahan yang disebabkan oleh gagalnya konsep dan praktik perdagangan bebas. *Fair trade* berupaya menciptakan hubungan mitra dagang yang berdasarkan pada dialog dan transparansi sebagai bentuk saling menghormati. *Fair trade* juga dapat melindungi produsen lokal di negara lemah tanpa harus terlibat dalam hukum proteksi (FISIPOL UGM Creative Hub, 2020). Kebenaran ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kathleen dkk (2019) dalam penelitiannya

yang berjudul “Implementasi Prinsip *Fair trade* oleh The Body Shop sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Rwanda” yang mana menunjukkan bahwa lahirnya mekanisme perdagangan *fair trade* melalui program *Community Trade* memberikan kesempatan kepada kelompok usaha berskala kecil untuk bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. (Mintarja, 2019, p. 3).

Adapun aktor lain yang turut mengimplementasikan konsep perdagangan *fair trade* yaitu produsen produk kecantikan asal Britania Raya yang bernama The Body Shop. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1976 dan mulai menjalankan praktik *fair trade* sejak tahun 1986 melalui pembentukan departemen lingkungan yang bertugas untuk menciptakan kampanye – kampanye bertemakan lingkungan (Wahyudi, 2016). Selain itu, The Body Shop juga menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan prinsip – prinsip dalam *fair trade* melalui pembuatan produk – produk kecantikan dengan menggunakan bahan alami. Salah satunya adalah produk *Shea Butter* yang diproduksi dari para petani di Ghana (The Body Shop, 2020) Keberhasilan The Body Shop dalam menerapkan prinsip – prinsip *fair trade*, khususnya di Ghana Utara tercerminkan dengan keberlanjutan dan kesejahteraan para petani Ghana (The Body Shop, 2022).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang kemudian menjadi perhatian bagi penulis dalam menulis skripsi “Dampak Penerapan *Fair Trade* The Body Shop terhadap Perekonomian Ghana Utara : Studi Kasus Pemberdayaan Petani Ghana Utara melalui Produksi *shea butter*” yaitu “**Bagaimana pengaruh Penerapan *Fair Trade* The Body Shop terhadap perekonomian Ghana Utara ?**”.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2022). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis menggunakan beberapa konsep sebagai instrumen pendukung penelitian. Konsep – konsep tersebut berfungsi untuk memberikan pemahaman dasar dalam menganalisis fenomena yang ada di dalam penelitian, diantaranya :

1. *Fair Trade*

Konsep *fair trade* adalah model kerjasama perdagangan yang dilakukan berdasarkan dialog, transparansi, rasa saling menghormati dan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam perdagangan internasional. Konsep ini pertama kali di gagas pada tahun 1940-an oleh Oxfam - Great Britain. Pada saat itu, kapitalisme global sedang menguat. Namun, aktivitas perdagangan

bebas dianggap telah mencederai hak - hak dari pekerja lokal. Maka dari itu konsep *fair trade* mulai hadir untuk memberikan penawaran kepada negara - negara yang terpinggirkan untuk berkomitmen mewujudkan perdagangan yang peduli terhadap peningkatan taraf hidup suatu negara, penjagaan terhadap hak - hak pekerja lokal hingga pembentukan sistem yang bersifat profit kepada kedua pihak. Menurut David Ransom, konsep *fair trade* dapat diklasifikasikan dalam 3 model. Pertama, produk primer dan kerajinan, *fair trade* model ini hadir sebagai upaya mempermudah distribusi barang dari produsen di negara berkembang menuju konsumen di negara maju. Kedua, produk olahan seperti teh, kopi, cokelat, dan lain sebagainya, *fair trade* model ini hadir untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh petani atau peternak di negara berkembang atau negara kurang berkembang mendapatkan upah yang layak. Ketiga, *fair trade* yang berguna untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan sustainability lingkungan (Ransom, 2009).

Prinsip 1. Menciptakan Peluang bagi Produsen yang secara ekonomi

Setiap negara memiliki kemampuan tersendiri dalam melakukan produksi. Namun tidak semua negara mampu memberikan wadah bagi produsen lokal untuk mengembangkan produknya sehingga dapat bersaing di ranah global. Seringkali produsen lokal mengalami berbagai hambatan dan tantangan untuk dapat berkembang (World Fair Trade Organization, 2017). Kondisi ini secara tidak langsung menghantarkan produsen lokal semakin dekat dengan kemiskinan maupun kerugian. Berdasarkan kondisi tersebut, *World Fair Trade Organization* (WFTO) menetapkan upaya penciptaan peluang bagi produsen dengan ekonomi tertinggal sebagai salah satu prinsip dalam *fair trade* dengan tujuan untuk membantu produsen lokal keluar dari kemiskinan, kemandirian ekonomi secara jangka panjang dan pengembangan kualitas sehingga mampu bersaing dengan produsen - produsen di ranah global. Adapun bentuk penerapan prinsip ini disalurkan melalui pengadaan kemitraan perdagangan dengan para produsen yang terpinggirkan yang mana dalam kemitraan ini akan dilakukan upaya pelatihan, kepemimpinan, fasilitas pendidikan dan upaya - upaya pemberdayaan lainnya (Munawaroh, 2018).

Prinsip 2. Perdagangan dilakukan secara transparan dan akuntabilitas

Transparan dan akuntabilitas merupakan dua kunci utama dalam membangun kerjasama yang adil antara produsen dengan investor. Kedua hal tersebut memberikan penekanan bahwa dalam *fair trade* setiap proses dalam kerjasama yang dibangun akan memberikan keterbukaan dan kesempatan bagi seluruh pihak terkait untuk turut andil dalam mengutarakan pandangannya

selama proses pengambilan keputusan. prinsip transparansi dan akuntabilitas ini digunakan agar hubungan kerjasama adil, terbuka, konsisten dan setara.

Prinsip 3. Perdagangan dilakukan dengan cara - cara adil

Para perusahaan yang menganut prinsip *fair trade* sangat menyadari bahwa perdagangan yang selama ini diterapkan tidak menerapkan prinsip keadilan. Pada kebanyakan kasus, keuntungan berada di tangan perusahaan sedangkan produsen dan pemasok mendapatkan rasio yang irasional. Maka dari itu, WFTO merancang perdagangan dalam konsep *fair trade* harus dilakukan dengan cara - cara adil sehingga hubungan yang terjalin antara perusahaan, produsen dan konsumen terbentuk sebagai hubungan jangka panjang yang mana dalam prosesnya melibatkan perilaku tanggung jawab, rasa saling percaya hingga saling menghargai terhadap sesama.

Prinsip 4. Pembagian upah sesuai dengan prinsip kemanusiaan

Upah seringkali menjadi persoalan utama yang menyebabkan angka kesejahteraan pekerja berada dalam tingkatan rendah. Pada prinsip keempat, *fair trade* menggunakan prinsip pembayaran adil untuk mendukung tujuan utama dari *fair trade* itu sendiri. Pembayaran adil dalam hal ini diartikan dengan proses perundingan antara perusahaan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kemitraan untuk mengutarakan dan menyepakati angka yang harus ditetapkan untuk masing - masing pihak. Pengaplikasian pembagian upah yang adil ini tidak melihat pada jenis gender seseorang tetapi melihat pada aspek biaya waktu, tenaga kerja, bahan baku dan lain sebagainya.

Prinsip 5. Pekerja merupakan orang yang berada dalam usia layak bekerja dan tanpa paksaan

Kenyamanan dan keamanan pekerja merupakan prinsip kelima dalam *fair trade*. Pada prinsip ini, WFTO mengacu pada Konvensi PBB mengenai Hak Anak dan hukum nasional atau lokal tentang pekerjaan anak. Sehingga setiap kemitraan yang dengan prinsip *fair trade* dapat memastikan tidak adanya kerja paksa atau memperkerjakan anak dibawah umur. Selain itu, WFTO menerapkan SOP untuk memastikan para pekerja bekerja ditempat yang aman dan tidak bekerja melebihi lama waktu yang sudah ditentukan.

Prinsip 6. Komitmen terhadap Non - Diskriminasi, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Kebebasan Berserikat

Diskriminasi, ketidaksetaraan gender dan sulitnya akses perempuan dalam berkarir menjadi salah satu fokus dari WFTO untuk menetapkan prinsip ke enam sebagai komitmen terhadap non-diskriminasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan

kebebasan berserikat. Melalui *fair trade*, perempuan dan laki - laki akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjadi produktif. *Fair trade* tidak membedakan ras, suku, agama dalam menempatkan sumber daya manusia pada sektor - sektor potensial. *Fair trade* menghormati hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih tanpa harus mengalami diskriminasi.

Prinsip 7. Perusahaan bertanggung jawab dalam memastikan kondisi tempat bekerja berada dalam keadaan layak

Kondisi kerja yang baik akan berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Oleh karena itu WFTO, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk para pekerja sesuai dengan undang - undang nasional dan internasional, khususnya merujuk pada konvensi *International Labour Organization (ILO)*.

Prinsip 8. Memberikan peningkatan kapasitas

Membentuk perusahaan yang sehat salah satunya dapat dicapai dengan pengembangan keterampilan dan kemampuan pekerja. Dalam hal ini, *fair trade* melalui prinsipnya yaitu peningkatan kapasitas akan memfasilitasi kegiatan - kegiatan khusus yang berguna untuk membantu produsen meningkatkan keterampilan manajemen, kemampuan produksi dan informasi mengenai akses pasar lokal, regional hingga internasional.

Prinsip 9. Kegiatan perdagangan diharuskan mempromosikan *fair trade* itu sendiri

Promosi adalah salah satu upaya untuk memperluas sebuah aktivitas agar dapat diketahui, dikenal dan dicintai. Kesadaran akan tujuan *fair trade* dalam membentuk dunia yang adil secara perdagangan. Maka dari itu setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan harus mempromosikan *fair trade* itu sendiri. Hal tersebut berguna untuk menebar pengaruh kebaikan kepada khalayak umum untuk menerapkan *fair trade* dalam skala global (World Fair Trade Organization, 2017).

Prinsip 10. Melindungi dan menghormati keberlanjutan lingkungan

Aktivitas produksi yang dilakukan *fair trade* tidak hanya mengusung prinsip adil bagi pekerja, produsen dan perusahaan. Namun, adil juga dimaknai dengan memaksimalkan penggunaan bahan mentan dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan. Artinya, aktivitas yang dilakukan dekat dengan upaya untuk mengurangi konsumsi energi, pengurangan terhadap penggunaan teknologi energi yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan meminimalisir dampak pada aliran limbah. Semua hal tersebut adalah penerapan prinsip menghormati lingkungan. Meskipun *fair trade* dicetuskan oleh kelompok individu yang mengatasnamakan representatif dari

Non- Government Organization (NGO). Akan tetapi, aktor yang bermain dalam menerapkan *fair trade* cukup beragam. Mulai dari individu hingga *Multinational Cooperations* (MNCs) (Susilo, 2018).

2. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu ekonomi pembangunan yang didalamnya berisi analisis mengenai masalah - masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi Negara Sedang Berkembang (NSB). Pembangunan ekonomi juga berguna untuk menentukan cara - cara yang dapat ditempuh oleh negara NSB dalam mengatasi masalah - masalah pembangunan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), pembangunan ekonomi berasal dari dua kata yaitu pemangunan dan ekonomi. Pembangunan memiliki arti sebagai hasil pemerkerjaan membangun sedangkan ekonomi memiliki arti sebagai sebuah ilmu yang berhubungan dengan pengelolaan barang industri, pertanian dan perdagangan (Herriyanto, 2008). Pendefinisian konsep pembangunan ekonomi mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Pada dua dekade yang lalu, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional yang dapat berada dalam keadaan statis selama jangka waktu yang cukup lama atau dengan kata lain terdapat kenaikan dan kestabilan dari *Gross National Product* (GNP) pada persentase 5-7% per tahun (Herriyanto, 2008, p. 14).

Namun setelah perang dunia berakhir, definisi pembangunan ekonomi bergerak pada pendefinisian secara luas tidak hanya berorientasi pada kenaikan GNP saja, akan tetapi meluas pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga secara garis besar, pembangunan ekonomi adalah upaya - upaya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dimana dalam upaya tersebut terdapat usaha untuk mendorong GNP perkapita dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam definisi lain menurut Reynold (1977), pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas atau seni yang dilakukan oleh para politisi dalam mencapai tujuan – tujuannya (Prayitno, 1996, p. 36). Pembangunan ekonomi juga berfungsi sebagai upaya untuk memberantas keterbelakangan, ketimpangan, ketergantungan, rendahnya fasilitas kesehatan dan aspek - aspek lain yang berhubungan dengan faktor penyebab terjadinya kemiskinan.

Berdasarkan historisnya, konsep pembangunan ekonomi telah muncul sejak kaum merkantilis hingga kaum klasik mulai dari Marx sampai Keynes. Konsep ini mulai dikenal oleh khalayak umum ketika tokoh ekonom terkenal, Adam Smith membuat sebuah buku yang berjudul

“ *The Wealth of Nations*” pada tahun 1776. Pada buku tersebut, Adam Smith berasumsi bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat melahirkan penurunan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Adam Smith juga membahas mengenai sebab - sebab suatu negara mengalami pembangunan ekonomi (Arsyad, 1992, p. 15). Meskipun konsepsi mengenai pembangunan ekonomi telah lahir, namun perhatian negara pada hal ini belum terlalu banyak, sebab :

1. Sebelum Perang Dunia II (PD II) berakhir, NSB belum menjadi negara yang berdaulat. Mereka masih berada dalam masa penjajahan yang mana dari perspektif negara penjajah masih berorientasi terhadap upaya - upaya untuk mengakumulasi keuntungan bukan pada peningkatan daerah ekonomi.

2. Pemimpin negara masih berfokus pada pemikiran mengenai bagaimana cara meraih kemerdekaan.

3. Penelitian terkait masalah pembangunan ekonomi masih sangat minim. Para ekonom lebih berfokus pada masalah kemerosotan ekonomi dan pembangunan.

Setelah perang dunia berakhir, diskusi mengenai ekonomi pembangunan mulai banyak dibahas terutama oleh NSB, sebab :

1. Pasca perang dunia, NSB sudah menjadi negara berdaulat sehingga memiliki cita - cita sebagai negara merdeka untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka dengan negara - negara mahu lainnya. Sebab ketika baru merdeka, NSB dihadapkan oleh permasalahan yang kompleks seperti kemiskinan, pertumbuhan penduduk dan permasalahan lainnya yang mendesak pembangunan ekonomi untuk segera dilakukan.

2. Munculnya perhatian negara - negara maju terhadap usaha pembangunan NSB. Hal ini diyakini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan politik negara maju ketika teribat dalam pembangunan ekonomi di NSB (Arsyad, 1992, pp. 16-17).

Pembangunan Ekonomi erat kaitannya dengan negara berkembang. Maka dari itu untuk menentukan kebutuhan pembangunan ekonomi, suatu negara perlu mengetahui klasifikasi negaranya. Dalam hal ini kita dapat lihat pembagian kelas dunia dimana negara dunia pertama dikategorikan kepada negara - negara kapitalis yang dipandang memiliki pengalaman panjang dalam pertumbuhan ekonomi seperti Eropa Barat, Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru Sedangkan negara dunia kedua dikategorikan kepada negara - negara sosialis yang sudah maju ekonominya seperti Eropa Timur dan RRC. Kemudian negara dunia ketiga dikategorikan kepada

negara - negara yang mempunyai tingkat pembangunan yang rendah dan tingkat pendapatan perkapita tidak lebih dari US \$200 (Budiarti, 2018). Setelah mengetahui klasifikasi negara, untuk melakukan pembangunan ekonomi diperlukan identifikasi terhadap apa yang menjadi penyebab negara tersebut masuk dalam kategori sebagai negara berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik negara berkembang sebagai berikut :

1. Standar Hidup yang rendah
2. Tingkat produktivitas rendah
3. Pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan tinggi
4. Tingkat pengangguran tinggi dan cenderung meningkat
5. Ketergantungan pada sektor pertanian dan ekspor barang primer
6. Kurangnya ketergantungan dan kepekaan terhadap hubungan internasional (Prayitno, 1996, pp. 38-40).

Selain itu, untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi dibutuhkan alat ukur atau syarat - syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Alat tersebut adalah indikator pembangunan. Indikator ini memiliki fungsi sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil - hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh suatu negara. Secara spesifik, indikator pembangunan akan memberikan gambaran terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan corak tingkat kesejahteraan di berbagai negara. Adapun indikator - indikator pembangunan yang dimaksud, sebagai berikut :

1. Pendapatan per kapita

Indikator pertama ini akan menunjukkan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita suatu negara dapat berkembang atau tumbuh dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pembangunan ekonomi tetap akan dianggap berhasil meskipun pendapatan per kapita suatu negara terhenti (dalam waktu singkat) namun mengalami peningkatan. Sehingga untuk bisa mencapai keberhasilan pada indikator ini, suatu negara harus bisa menjaga laju pertambahan penduduk. Sebab walaupun pendapatan nasional suatu negara mengalami peningkatan tetapi tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang stabil maka pembangunan ekonomi tidak berhasil pada indikator pendapatan per kapita (Prayitno, 1996, pp. 46-48).

2. Urbanisasi

Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan indikator kedua dalam

pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan urbanisasi menentukan adanya jaminan kesejahteraan dan kemakmuran sebab urbanisasi yang masif menandakan suatu negara memiliki kesempatan kerja yang luas. Kondisi ini juga menunjukkan adanya produktivitas produksi yang datang dari pemesanan kebutuhan barang dan jasa yang tinggi sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak lagi jumlah pekerja. Ketika jumlah pekerja meningkat maka angka pengangguran akan menurun dan kemiskinan dapat di berantas (Universitas Bung Hatta, 2021).

3. Struktur ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari perkembangan struktur ekonomi sebuah negara. Hal ini dapat ditandai apabila sebuah negara mengalami perubahan yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian kemudian digantikan dengan sektor industri. Hal ini menandakan adanya kemajuan dari kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang mentah menjadi barang jadi.

4. Angka tabungan

Angka tabungan berkaitan erat dengan struktur ekonomi sebuah negara. Dalam hal ini angka tabungan dimaknai sebagai modal dalam sebuah perekonomian. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan menunjukkan perkembangan ketika angka tabungan yang dimiliki dalam struktur ekonomi berada dalam angka yang tinggi.

5. Indeks Kualitas Hidup (IKH)

Indeks Kualitas Hidup (IKH) adalah salah satu indeks yang berfungsi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Di dalam IKH terdapat 3 indikator. Pertama, angka harapan hidup. Kedua, angka kematian. Ketiga, tingkat melek huruf. IKH tidak terbatas pada konsep standar hidup yang berorientasi pada pendapatan tetapi secara luas mencakupi pendapatan, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja. Ketika komponen - komponen tersebut terpenuhi maka menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (EOCD) sebuah negara tersebut memiliki kualitas hidup yang sejahtera dan hal ini mencerminkan keberhasilan dari pembangunan (kumparan.com, 2022).

6. Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu indikator penting yang tak dapat diabaikan dalam pembangunan ekonomi. Sebab pembangunan ekonomi yang baik harus didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi. Kualitas pendidikan sebuah negara juga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana melibatkan komponen - komponen penting seperti,

angka harapan hidup, angka melek huruf, rata - rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan standar dari *United Nation Development Programme* (Badan Pusat Statistik, 2022).

7. Kesehatan

Kesehatan menjadi aspek penting dalam pembangunan karena secara langsung mempengaruhi pembangunan ekonomi di sebuah negara. Hal ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Semakin lengkap fasilitas kesehatan atau semakin mudah akses kesehatan maka semakin tinggi angka harapan hidup masyarakat di suatu negara.

8. Tempat tinggal

Tempat tinggal menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena tanpa adanya tempat tinggal sulit bagi seorang individu untuk menjalani aktivitas sehari - hari. Indikator tempat tinggal dalam hal ini mencakup persoalan terkait terpenuhinya fasilitas air, listrik, sarana sanitasi dan kualitas tempat tinggal yang layak huni. Semakin nyaman dan lengkap tempat tinggal yang tersedia maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara dan hal ini akan berimplikasi pada keberhasilan pembangunan ekonomi.

9. Kriminalitas

Pembangunan ekonomi tidak akan berarti ketika suatu negara tidak mampu menciptakan kondisi negara yang aman. Angka kriminalitas yang tinggi akan membuat masyarakat tidak nyaman untuk melakukan kegiatan sehari - hari. Ketika mereka merasa tidak nyaman maka produktivitas mereka akan menurun dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pembangunan ekonomi akan berhasil jika suatu negara mampu menurunkan atau menghilangkan angka kriminalitas di negaranya.

10. Akses media

Akses media berkaitan dengan keterbukaan negara terhadap tersedianya fasilitas - fasilitas menuju tempat - tempat yang tidak terjangkau. Hal ini memiliki kaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan akan informasi terhadap dunia luar. Adapun komponen - komponen untuk melihat keterbukaan terhadap akses media dapat dilihat dari jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi dan lain sebagainya (kumparan.com, 2022).

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis melihat Ghana Utara yang menyandang status sebagai Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan negara yang miskin secara ekonomi.

Negara ini sangat tertinggal dibandingkan dengan negara lain di wilayah Afrika Barat. Hampir setengah anggaran pemerintah yang dihasilkan oleh negara ini bersumber dari bantuan negara - negara maju. Sehingga perekonomian Ghana diwarnai dengan campur tangan perusahaan swasta. Meskipun secara status negara ini telah merdeka akan tetapi dalam sektor politik, pemerintah belum bisa memegang kendali penuh untuk mencapai pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan negara ini kekurangan modal, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya daya saing dari produsen lokal, produktivitas rendah, tingginya angka pengangguran, tidak tersedianya akses pendidikan dan kesehatan serta roda pemerintahan yang dijalankan dengan penuh korup (Munawaroh, 2018).

Namun setelah tahun 1987, *Community Fair Trade* mulai muncul di Ghana untuk memberikan harapan baru terhadap hambatan - hambatan pembangunan ekonomi yang ada melalui aktivitas produksi *shea* butter yang di gagas oleh The Body Shop yang diimplementasikan melalui 10 prinsip *fair trade*. Penerapan prinsip *fair trade* yang diimplementasikan melalui aktivitas produksi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita yang dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas produksi, perubahan struktur ekonomi yang awalnya didominasi oleh petani *Shea butter* yang menjual produk mentah menjadi petani yang memproduksi barang dengan nilai jual yang lebih tinggi, menurunnya angka pengangguran karena tiap tahunnya di Ghana ada 640 pekerja perempuan dan 49.000 masyarakat sekitar yang mendapatkan lapangan pekerjaan, tersedianya akses pendidikan melalui pendirian 7 sekolah yang dapat menampung 1.200 siswa, tersedia akses kesehatan melalui pendirian pusat kesehatan dan beberapa pelatihan yang dapat membantuk peningkatan Indeks Kualitas Hidup (IKH) di Ghana (The Body Shop, 2022).

D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menarik hipotesis menarik hipotesis bahwa dampak penerapan *fair trade* oleh The Body Shop melalui aktivitas produksi *Shea Butter* memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di Ghana Utara yang ditunjukkan dengan peningkatan pada 4 indikator yang ditandai dengan perubahan struktur ekonomi, peningkatan Indeks Kualitas Hidup (IKH), peningkatan aspek kesehatan dan tempat tinggal.

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang ditemukan, maka terbentuk tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penerapan *Fair trade* oleh *The Body Shop* terhadap Petani *shea* di Ghana Utara

2. Menjelaskan perubahan dampak dan kondisi perekonomian Ghana Utara setelah diterapkannya *fair trade*

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini didasarkan pada ciri - ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2022, p. 2). Metode kualitatif seringkali disebut sebagai metode artistik karena proses penelitiannya bersifat seni (kurang terpola) dan disebut juga sebagai metode *interpretative* sebab hasil penelitian lebih berfokus terhadap interpretasi pada data yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat prediktif (*predictive research*) dimana peneliti akan memprediksi atau memperkirakan kemungkinan - kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang berdasarkan hasil analisis dari keadaan saat ini (Meitri H.C Daluarti, 2021). Kemudian dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan melalui berbagai literatur seperti buku - buku, jurnal, skripsi, artikel dan dokumen resmi yang dapat diakses secara *online* (Dawson, 2010, p. 10).

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi untuk fokus pada pembahasan mengenai dampak yang ditimbulkan dari penerapan *fair trade* oleh *The Body Shop* terhadap pembangunan ekonomi Ghana Utara melalui aktivitas produksi *Shea butter* yang dilakukan oleh petani setempat. Adapun pemilihan Ghana Utara sebagai batasan tempat pada penelitian dikarenakan Ghana merupakan salah satu negara di Afrika yang tergolong sebagai negara miskin yang banyak di rugikan atas adanya sistem perdagangan bebas. Sedangkan berdasarkan waktu, penulis menggunakan tahun 1998 sampai dengan tahun 2019. Tahun 1998 merupakan tahun pertama bagi Petani *Shea butter* di Ghana Utara sebagai anggota komunitas *fair trade* *The Body Shop* mendapatkan pelatihan. Kemudian tahun 2014-2019 adalah jangkauan waktu dimana petani Ghana mulai merasakan manfaat dari diberlakukannya *fair trade*.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam empat bab, dimana pembahasan pada setiap bab akan dijabarkan secara detail pada sub - sub bab. Setiap pembahasan yang ada pada bab dalam skripsi ini memiliki korelasi antara satu bab dengan bab lainnya. Sehingga keseluruhan bab yang tertera membentuk sebuah karya tulis yang terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut :

BAB 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi 8 sub bagian yang mana pada sub bab latar belakang berisikan awal mula lahirnya model perdagangan bebas yang dibawa oleh globalisasi hingga perubahan model perdagangan yang disebabkan oleh munculnya masalah perdagangan bebas di Afrika tepatnya Ghana Utara menjadi perdagangan adil yang di prakarsai oleh The Body Shop. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada penulis kemudian merumuskan rumusan masalah pada sub bab selanjutnya dengan mempertanyakan dampak penerapan *fair trade* The Body Shop terhadap perekonomian Ghana Utara. Rumusan masalah tersebut kemudian ditelaah lebih lanjut melalui sub bab kerangka teori dengan menggunakan konsep *fair trade* dan teori pembangunan ekonomi sehingga menghasilkan sub bab hipotesis yang berbunyi “penerapan *fair trade* oleh The Body Shop melalui aktivitas produksi *shea butter* memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di Ghana Utara yang ditunjukkan dengan terpenuhinya 10 indikator pembangunan ekonomi”.

Adapun yang mendasari penelitian ini tercantum pada sub bab tujuan penelitian, dimana penulis melakukan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan *fair trade* The Body Shop terhadap Petani *shea* di Ghana Utara dan menjelaskan perubahan kondisi perekonomian Ghana Utara setelah diterapkannya *Fair trade*. Selanjutnya pada sub bab metodologi penelitian penulis menjabarkan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yang bersifat prediktif menggunakan data sekunder yang diambil melalui teknik penelitian kajian pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, artikel dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Selain itu, pada sub bab jangkauan penelitian tercantum fokus penulis dalam melakukan penelitian yaitu pada tahun 2014-2019.

BAB 2 merupakan bab pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum terhadap dinamika perubahan model perdagangan internasional semenjak hadirnya globalisasi yang melahirkan model perdagangan bebas dengan memunculkan harapan bahwa hambatan - hambatan perdagangan akan terselesaikan dan semua aktor dapat mengakses perdagangan tanpa

batas. Namun ternyata mekanisme perdagangan bebas mulai memperlihatkan dampak negatif yang utamanya dirasakan oleh negara - negara di kawasan Afrika khususnya terhadap Ghana Utara. Negara tersebut merasakan penerapan perdagangan bebas hanya menimbulkan ketimpangan ekonomi dan langgengnya eksploitasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Ghana. Kondisi ini kemudian disikapi oleh The Body Shop sebagai perusahaan kecantikan untuk menerapkan model perdagangan baru yaitu *fair trade* sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di Ghana Utara melalui aktivitas produksi *shea butter*.

BAB 3 merupakan bab pembahasan lanjutan yang memaparkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai dampak yang ditimbulkan dari penerapan *Fair trade* oleh The Body Shop terhadap pembangunan ekonomi di Ghana ternyata memperlihatkan dampak positif. Hal ini dilihat dari terwujudnya 5 indikator yang dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan ekonomi di Ghana Utara. The Body Shop melalui penerapan *fair trade* mampu dengan meningkatnya urbanisasi yang ditandai dengan tersedianya lapangan pekerjaan, perubahan struktur ekonomi, tersedianya akses pendidikan dan kesehatan serta tempat tinggal yang layak yang berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Hidup (IKH) di Ghana Utara.

BAB 4 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas bab - bab sebelumnya.